

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DI KABUPATEN JEMBER

(STUDI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER)

Oleh:

Wini Alvionita (1410511007)

Pembimbing: Dr. Emy Kholifah R, M.Si

Program Study Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49 Telp./Fax (0331)336728 (112) / 337957 Kotak Pos 104 Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang implementasi peraturan bupati jember nomor 40/2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis di kabupaten jember penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang penanganan dinas sosial kabupaten jember dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah dinas sosial kabupaten jember satpol PP, LSM, TRC (time reaksi cepat), tokoh masyarakat atau / masyarakat, serta gelandangan dan pengemis.

Dinas kabupaten jember merupakan suatu instansi yang memberikan pelayanan di bidang rehabilitasi sosial dengan hal tersebut dinas sosial dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif atau sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis dinas sosial kabupaten jember melakukan beberapa usaha dalam penanganan gelandangan dan pengemis yaitu meliputi : a. Usaha represif, b. Usaha preventif, c. Usaha rehabilitatif dan D, bimbingan lanjut hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang dilaksanakan dinas sosial terhadap gelandangan dan pengemis di kabupaten jember belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan terkendala oleh kurangnya dana, sumberdaya manusia, dan juga waktu dalam penanganan gelandangan dan pengemis sehingga dapat lebih efektif lagi mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis.

Kata Kunci : implementasi, penanganan, gelandangan dan pengemis

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of regulation of jember regent number 40/2014 on the handling of homeless and beggars in jember district. This research was conducted to know about the handling of social office of district of jember in handling homeless and beggar. The method used in this research is descriptive qualitative. Methods of data collection by way of observation, interview and documentation. Subjects in this research are social districts jember Satpol PP, NGOs, TRC (quick reaction time), community or community leaders, as well as homeless and beggars.

Jember district office is a department that provides services in the field of social rehabilitation with the social department is required to provide effective services or in accordance with the policy already set. In the implementation of homeless handlers and

beggars of the social service district of Jember do some effort in handling homeless and beggars that include: a. Repressive business, b. Enterprises preferential, c. Rehabilitative efforts and D, further guidance of research results indicate that the handlers conducted by social services to homeless and beggars in Jember district has not been maximized. It is crippled by lack of funding, human resources, and also time in homeless and begging management so that it can more effectively reduce the number of homeless and beggars.

Keywords: implementation, handling, homeless and beggar

BAB IPENDAHULUAN

Pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan Nasional seperti termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaksud dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki angka kemiskinan besar. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya semakin berat saja. Pasalnya, jumlah penduduk miskin di kabupaten Jember kini mengalami penurunan menjadi 269.540 jiwa penduduk miskin tahun 2015, atau turun sekitar 0,06 persen dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebanyak 270.400 jiwa penduduk miskin. Turunnya sejumlah kebijakan yang telah diterapkan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah memberikan andil terhadap turunnya angka kemiskinan. Kabupaten Jember melalui sejumlah program kerja.

Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di kabupaten Jember saat ini semakin banyak dan sulit diatur,

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Jember, populasi gelandangan, pengemis dan anak jalanan secara nasional terlihat naik turun tiga tahun terakhir. Tahun 2013 berjumlah 53 anak jalanan dan 275 orang anak terlantar dan pada tahun 2014 jumlah ini meningkat menjadi 93 orang anak jalanan dan 388 orang anak terlantar terakhir pada tahun 2015, terdapat 89 orang anak jalanan dan 385 orang anak terlantar yang terdata. Sedangkan data yang tercatat dari Dinas Sosial jumlah pengemis dan gelandangan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, tahun 2013 ada 155 orang pengemis dan 43 orang gelandangan, setahun kemudian, jumlah meningkat drastis menjadi 354 orang gelandangan dan 421 pengemis, tahun 2015, jumlah semakin meningkat menjadi 358 orang gelandangan dan 443 orang pengemis. Penyebab banyaknya gelandangan dan pengemis di kota besar, bukan selalu korban dari tidak adanya lapangan pekerjaan, tetapi juga dari faktor tidak adanya keinginan untuk berusaha dan ketidak memilikinya keterampilan, dan pada kenyataannya banyak kita lihat gelandangan dan pengemis yang justru masih mampu untuk berusaha, berusaha dalam arti apa saja yang penting bisa makan.

Dalam pelaksanaan program penanganan gelandangan dan pengemis di kabupaten Jember masih memiliki kendala-kendala seperti:

1. Minimnya lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang dalam keadaan mereka kekurangan perekonomian dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga membuat orang-orang yang merasa

- tidak mampu dalam perekonomiannya mereka lebih memilih menggelandang dan mengemis
2. Kurangnya kesempatan kerja bagi mereka yang sangat membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya
 3. Rendahnya tingkat pendidikan dikarenakan mereka sangat tidak mampu dalam perekonomiannya untuk membiayai anak-anaknya dalam berpendidikan sehingga mereka memilih menggelandang atau mengemis dari pada melanjutkan pendidikannya
 4. Kebijakan pemerintah yang masih belum maksimal dalam hal implementasi,seringkali terjadi ketidak fokusan atau kurangnya penanganan dari pemerintah sehingga membuat para gelandangan dan pengemis semakin bertambah khususnya dikabupaten jember

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penilitian Kualitatif yaitu merujuk pada "cara-cara" mempelajari aspek kualitatif dari kehidupan sosial yang mencakup beragam dimensi sosial dari tindakan "Action" dan keadaan, hingga proses dan peristiwa, sebagaimana dimengerti berdasarkan konstruksi dan makna yang diorganisasikan oleh dan melalui praktik-praktik sosial. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, yang dimaksud dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

Lokasi penelitian di Dinas Sosial di Kabupaten Jember, selain itu terdapat beberapa tempat yang disinyalir menjadi sarang bagi gelandangan dan pengemis tersebut, antara lain kawasan Alun-Alun Kota Jember, dan Jalan Jawa Jember

sehingga akan diperoleh data yang cukup untuk melaksanakan penelitian ini.

Metode pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan teknik pengumpulan data metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik analisis secara kualitatif, prosedur penelitian tidak distandardisasi dan bersifat fleksibel. Jadi, yang ada adalah petunjuk yang dapat dipakai, tetapi buakan atauran. Ada beberapa metode pengumpulan data yang dikenal dalam penelitian kualitatif, walaupun demikian bisa dikatakan bahwa metode yang paling pokok adalah pengamatan atau observasi dan wawancara mendalam atau in-depth interviw. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analysis interactive model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

BAB IV PEMBAHASAN

Kabupaten Jember secara astronomis terletak pada posisi $6^{\circ}27'29''$ s/d $7^{\circ}14'35''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}59'6''$ s/d $8^{\circ}33'56''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas $3.293,34 \text{ Km}^2$ dan memiliki ± 76 pulau-pulau kecil dengan pulau terbesar adalah Pulau Nusa Barong. Penggunaan lahan di Kabupaten Jember didominasi oleh fungsi kegiatan budidaya, dimana lahan yang dibudidayakan untuk pertanian adalah seluas 46,41 % dari luas wilayah, sedangkan sisanya digunakan untuk permukiman seluas 9,93 %, hutan seluas 21,17 % dan lain-lain seluas 22,49 %.

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0 – 3.330 meter di atas

permukaan laut. Daerah dengan ketinggian 100 – 500 meter di atas permukaan air laut merupakan kawasan terluas, yaitu 1.240,77 km² atau 37,68 % dari luas wilayah Kabupaten Jember sedangkan kawasan tersempit adalah daerah dengan ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut dengan luas 31,34 km² atau 0,95 % dari luas wilayah Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember memiliki karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan serta dikelilingi oleh pegunungan yang memanjang pada batas Barat dan Timur. Di wilayah Barat Daya memiliki dataran dengan ketinggian 0 – 25 meter di atas permukaan laut, sedangkan di wilayah

A. Implementasi Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Berdasarkan pada bab ini, penulis akan menjabarkan penelitian implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis Di Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi secara mendalam berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, teori ini terdiri dari 6 elemen, yaitu standart dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial politik dan ekonomi serta disposisi para pelaksana. Akan tetapi berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis hanya ada 4 indikator yang ditemukan dalam lapangan yaitu sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, hubungan antar organisasi, dan kondisi sosial politik dan ekonomi.

1. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya berguna untuk menunjang implementasi dari suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang cukup dan memadai implementasi suatu kebijakan akan terganggu dan menjadi agak sulit untuk dilaksanakan. Sumber daya yang ada

pada pihak pelaksana kebijakan harus cukup dan memadai sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan, sumber daya ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

2. Finansial

Finansial merupakan sumber daya yang tidak kalah pentingnya dengan manusia, ketika sumber daya manusia sudah tersedia sedangkan dana melalui anggaran tidak tersedian, maka memang menjadi persoalan untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan tersebut. Dari wawancara Kepala bidang rehabilitasi Sosial mengemukakan bahwa secara finansial dinas sosial tidak mengalami kesulitan untuk melakukan penanganan gelandangan dan pengemis

3. Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu proses implementasi, apabila sumberdaya manusia dalam sebuah organisasi kurang dalam hal jumlah maka kegiatan organisasi tidak akan berjalan secara optimal, sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara maksimal. dapat diketahui bahwa secara keseluruhan dinas sosial memiliki 40 pegawai yang bertugas. Secara keseluruhan dinas sosial yang berjenis perempuan memiliki jumlah 17 sedangkan pegawai dinas sosial yang berjenis kelamin laki-laki 23 untuk sebuah dinas yang memiliki tugas penting yang tidak kalah penting dengan dinas lainnya. Dinas sosial masih termasuk kekurangan sumber daya manusia, apalagi untuk bidang rehabilitasi sosial yang lebih khususnya pada bagian gelandangan, pengemis dan pengamen yang bersentuhan langsung dengan peraturan bupati Nomer 40 Tahun 2014.

4. Waktu

Waktu merupakan sumberdaya terakhir yang sama pentingnya dengan sumberdaya yang sebelumnya, waktu akan mempengaruhi tingkat kesulitan pelaksana kebijakan untuk melakukan suatu kebijakan tersebut secara maksimal. Saat sumberdaya masih giat dan dana berjalan dengan baik tetapi terbentur dengan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu waktu juga berbicara dengan masalah jam kerja pegawai apakah sudah sesuai atau malah melampaui batas. Berdasarkan ungkapan dari bidang rehabilitasi sosial menyatakan bahwa tidak ada batasan waktu untuk menyelesaikan penerapan kebijakan ini, tapi hal tersebut tidak membuat dinas sosial jadi tidak serius dalam menangani gelandangan dan pengemis, apalagi semenjak adanya isu dari kementerian sosial RI mengenai pada tahun 2018 Indonesia bebas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis

5. Karakteristik Agen Pelaksana

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan tujuan :

- a. mengurangi jumlah Gelandangan dan Pengemis di wilayah perkotaan;
- b. mewujudkan pelayanan rehabilitasi terpadu terhadap gelandangan dan pengemis melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan dengan pemangku kepentingan terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam Nota kesepahaman;

- c. terwujudnya kota bebas gelandangan dan pengemis serta mengurangi tindak kriminalitas;
- d. membangun dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis antara Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa dengan pemangku kepentingan, dunia usaha dan elemen masyarakat;
- e. optimalisasi pemanfaatan UPT LIPOSOS dalam penanganan gelandangan dan pengemis;
- f. meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya dan gelandangan dan pengemis pada khususnya; dan
- g. mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.

Sebagai sebuah kebijakan publik yang berusaha untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Jember selaku pelaksana dari suatu kebijakan ini melibatkan agen pelaksana didalamnya salah satu kegiatan rutin dari dinas sosial yaitu melalui patroli yang ditangani langsung oleh tim penanganan terpadu yaitu tim ini bekerja dengan dalam 2 shift yaitu shift pertama pukul 09.00- selesai sedangkan shift kedua yaitu pukul 15.00- selesai didalam berpatroli apabila bertemu dengan gelandangan dan pengemis langsung ditangkap oleh petugas

6. Hubungan Antar Organisasi

Didalam setiap implementasi kebijakan diperlukan peran yang sangat penting dari berbagai elemen yang terkait. Walaupun ada satu elemen yang menjadi tumpuan atau pelaksana tumpuan, tentu harus membutuhkan elemen lain supaya tujuan yang sudah ditentukan bisa tercapai. Dalam hubungan antar organisasi ini Dinas Sosial merupakan pelaksana utama untuk menerapkan kebijakan penanganan

Gelandangan dan Pengemis. Tentunya Dinas Sosial tidak mampu untuk melaksanakannya dengan sendirian, oleh karena itu Dinas Sosial bekerja sama dan dibantu oleh beberapa elemen yaitu antara lain, Satpol PP, Polres Jember, dan Panti Liposos Kabupaten Jember. Mengenai bentuk Hubungan antar organisasi dari Dinas Sosial dan Satpol PP. Dapat diketahui bahwa koordinasi dan hubungan yang telah dilakukan oleh dinas sosial dengan satpol PP sudah cukup baik, karena mereka bisa membantu satu sama lain dalam kegiatan razia dan patroli yang dilaksanakan setiap minggunya. Jadi dapat disimpulkan dari semua pernyataan atau wawancara diatas bahwa mengenai hubungan antar organisasi yang terlibat sudah cukup bagus hanya saja perlu diperkuat lagi koordinasi dan hubungan antar kecamatan, kelurahan dengan dinas sosial supaya gelandangan dan pengemis bisa semakin berkurang di Kabupaten Jember.

7. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Yang perlu diperhatikan disini adalah lingkungan eksternal yang ada dalam penerapan suatu kebijakan. Lingkungan eksternal memang membawa pengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila lingkungan eksternal tidak kondusif maka akan menjadi penyebab dari kegagalan implementasi kebijakan, maka dari itu kondusifitas lingkungan harus pula diperhatikan agar pengimplementasian kebijakan dapat terlaksanakan dengan baik. Dalam implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis lingkungan yang paling dekat adalah masyarakat itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa Dinas sosial sendiri tidak dapat menjamin apabila gelandangan dan pengemis tidak kembali lagi kejalan atau kerumah-rumah. Dinas sosial telah melakukan atau mengarahkan segala cara untuk menekan tingkat jumlah gelandangan dan pengemis disetiap tahunnya. Akan tetapi setelah berbagai

upaya telah dilakukan oleh dinas sosial semua kembali kepada masing-masing individu. Jasi kesimpulannya adalah masyarakat sendiri belum berperan aktif dalam membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini karena masih banyak masyarakat yang memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis dengan berbagai alasan.

Dinas Sosial masih belum mempunyai atau masih kurang pemahaman dalam pelaksanaan penanganan Gelandangan dan pengemis dikarenakan dalam pelaksanaan penanganan Gelandangan dan Pengemis tersebut membutuhkan pelaksana atau implementor yang mempunyai kemauan dan pemahaman yang lebih dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis tersebut.

Kemiskinan sebagai keterbatasan yang disumbang oleh seseorang sebuah keluarga, sebuah komunitas maupun sebuah negara yang menyebabkanketidaknyamanan dalam kehidupannya, terancamnya penegakan hak dan keadilan. Dan pada jangka panjang dapat menghilangkan serta suramnya masa depan bangsa. Tinjauan kemiskinan ekonomi diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan mata pencaharaan yang mapan yang memberikan penghasilan yang layak untuk menunjang kehidupannya. macam-macam kemiskinan antara lain :

- a. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi
- b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan
- c. Kemiskinan konsekunsial

Secara umum kemiskinan dapat diukur dalam dua dimensi yaitu dimensi kekayaan dan keuangan, dimensi kekayaan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan yang diterima karena pendapatan rendah biasanya bersifat sementara sedangkan dimensi keuangan ditandai dengan adanya keputusan yang dapat menimpa berbagai rumah tangga

berpenghasilan rendah. Kemiskinan erat kaitannya dengan pengangguran, pengangguran melahirkan sebuah permasalahan kemiskinan yang mana seseorang jika pengangguran maka cenderung tidak adanya pendapatan biaya hidup, pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada, selain itu bukan berarti ketiadaan atau kurangnya ketersediaan lapangan kerja menjadikan masalah utama bagi pengangguran, akan tetapi adanya lapangan kerja disertai juga dengan skill yang layak untuk mengisi pekerjaan tersebut.

Jember masih menjadi tempat favorit bagi gelandangan dan pengemis terbukti dalam waktu beberapa jam, operasi penertiban yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember berhasil menjaring beberapa gelandangan dan pengemis, operasi ini sempat mendapat perlawanan dari para gelandangan dan pengemis yang akan ditertibkan, bahkan ada salah satu seorang gelandangan dan pengemis yang ditangkap sempat memberontak, karena merasa akan ditahan, selain itu gelandangan dan pengemis juga mengaku takut apabila dipulangkan kerumahnya.

JENIS	TAHUN		
	2013	2014	2015
Anak jalanan	53 orang	93 orang	89 orang
Anak terlantar	275 orang	388 orang	385 orang
Pengemis	155 orang	421 orang	443 orang
Gelandangan	43 orang	354 orang	358 orang
Jumlah	526	1.256	1.275

Berdasarkan data selama 3 tahun jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Jember mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Hasil data menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten yang telah gagal menanggulangi pengemis karena ternyata pengemis semakin merebak di kota Jember dan bentuk pengawasan dari pemerintah tidak terlalu terorganisir hal ini terjadi karena sumber daya dari pemerintah kabupaten sedikit dan program yang dijalankan tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan peraturan Bupati nomor 40 tahun 2014 Dinas sosial melaksanakan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis yaitu meliputi usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut, penanganan yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten jember yaitu dengan bekerja sama dengan satpol PP yaitu untuk mempermudah proses operasi atau penertiban dilokasi-lokasi yang diperkirakan banyak tidaknya gelandangan dan pengemis. di Liposos (lingkungan Pondok Sosial) gelandangan dan pengemis tersebut diproses identifikasi, tujuannya dari proses identifikasi yaitu untuk menentukan identitas,

Penanggulangan Gelandangan dan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemis serta mencegah meluasnya pengaruh akibat gelandangan dan pengemis didalam masyarakat dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang mempunyai harga diri.

Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis didalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis, usaha preventif yaitu sebagai berikut :

- a. Penyuluhan dan bimbingan sosial
- b. Pembinaan sosial
- c. Bantuan sosial
- d. Perluasan kesempatan kerja
- e. Pemukiman lokal
- f. Peningkatan derajat kesehatan
- g. Peningkatan pendidikan

Selanjutnya usaha represif yaitu mengurangi gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemis, usaha represif ini meliputi :

- a. Razia , dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang untuk itu
- b. Penampungan sementara untuk para gelandangan dan pengemis setelah terjaring razia mereka akan ditampung sementara di UPT LIPOSOS jember untuk dilakukan identifikasi apakah mereka para geandangan dan pengemis masih mempunyai keuarga atau tempat tinggal.
- c. Pelimpahan

Adapun cara pelimpahan ini adalah : dilepas dengan syarat, dimasukkan dalam panti sosial dikembalikan kepada orang tua wali, diserahkan kepada pengadilan, diberikan pelayanan kesehatan

Selanjutnya usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan, usaha rehabilitatif sosial sebagaimana dilaksanakan melalui Dinas Sosial

- a. Bimbingan fisik, dimana Dinas Sosial melakukan bimbingan fisik terhadap para gelandangan dan pengemis yaitu contohnya seperti olahraga dll.

- b. Bimbingan mental, Dinas Sosial melakukan bimbingan mental terhadap Gelandangan dan pengemis yaitu memberikan bimbingan mental seperti bimbingan rohani supaya para gelandangan dan poengemis tidak melakukan pergelandangan atau pengemisan lagi.

- c. Bimbingan sosial, Dinas Sosial melakukan bimbingan sosial seperti sosialisasi atau memberikan bimbingan supaya mereka tau atau paham bahwa yang mereka lakukan itu sangat tidak baik untuk lingkungan keluarga atau masyarakat

- d. Bimbingan keterampilan, dinas sosial mengadakan bimbingan keterampilan seperti tata cara berjualan atau berbbisnis, pelatihan tata rias, pelatihan bengkel dll.

Selanjutnya yaitu usaha bimbingan lanjut terhadap gelandangan dan pengemis meliputi

- a. Penyiapan resosialisasi bagi Gelandangan dan Pengemis
- b. Peningkatan kondisi perekonomian Gelandangan dan Pengemis melalui perangkat kabupaten terkait dan dapat diberikan bantuan berupa modal usha ekonomi produktif
- c. Menyiapkan keluarga dan lingkungan agar mampu mendukung usaha resosialisasi bagi gelandangan dan pengemis untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Untuk solusi dari dinas sosial tersebut agar pengemis tersebut tidak kembali lagi mengemis dengan adanya kerjasama dengan masyarakat dan juga fasilitas untuk penanganan segera tersediakan, salah satu solusinya yaitu agar

masyarakat untuk tidak memberi uang kepada para pelaku pengemis sendiri, karena bila masyarakat sendiri memberi uang kepada mereka para pengemis justru malah mengakibatkan bertambahnya para pelaku pengemis yang semakin bertambah di kabupaten Jember. Jadi peran masyarakat disini sangatlah penting dan diperlukan untuk permasalahan ini, bahkan lebih tepatnya peran dari masyarakat sendiri sangatlah berdampak besar, maka dari itu kesadaran dari masyarakat sangatlah penting.

Dalam setiap organisasi pastinya memiliki faktor penghambat dan pendukung dalam pencapaian visi dan misi organisasi tersebut. Seperti halnya Dinas Sosial kabupaten Jember yang memiliki faktor penanganan dan penertiban gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember antara lain

a. Faktor Pendukung

Dengan adanya peraturan Bupati nomor 40 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis memiliki kekuatan hukum yang sudah sah dan dapat dilaksanakan sesuai dan dengan ketentuan isi didalam peraturan bupati tersebut, maka bagaimana pemerintah akan menertibkan dan menangani gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum tersebut, jika tidak ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut, salah satu faktor pendukung atau pendorong yaitu adanya anggaran yang terencana, adanya tim penanganan gelandangan dan pengemis, adanya sarana UPT LIPOSOS yang tersedia dan adanya tenaga medis. Faktor-faktor pendukung tersebut yang melatar belakangi keberadaan UPT LIPOSOS Dinas Sosial Kabupaten Jember

b. Faktor Penghambat

Peraturan tersebut sebenarnya dari minimnya dana sehingga

pelaksanaan razia tidak bisa dilakukan secara intensif dan kesulitan untuk memulangkan gelandangan dan pengemis kedaerah asal mereka, dan minimnya dana untuk lapangan pekerjaan,, kurangnya kerjasama antar lembaga terkait dan juga masyarakat, serta tidak adanya sanksi tegas yang membuat para gelandangan dan pengemis tersebut jera sehingga mereka tidak melakukan aktivitas memintaminta didepan umum, sulitnya pembinaan bakat minat gelandangan dan pengemis, kurangnya tenaga ahli dalam penanganan gelandangan dan pengemis, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, belum maksimalnya keterlibatan lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk pendukung penanganan gelandangan dan pengemis.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pengimplementasian kebijakan ini Dinas Sosial sudah dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya namun masih belum maksimal, akan tetapi dalam pengimplementasian kebijakan tersebut ada beberapa kendala salah satunya yaitu Sumber Dana, Sumber Daya Manusia, dari segi waktu

DAFTAR PUSTAKA

Priyanto Norika, penanganan gelandangan dan pengemis dalam persektif siyasah, universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta, yogyakarta, 2015 (jurnal)

Sudhana Ketut, budaya kemiskinan dimasyarakat : tinjauan kondisi kemiskinan dan kesadaran budaya miskin dimasyarakat, fakultas ekonomi dan ilmu politik unuversitas Udayana Bali pada tahun 2010

Nusanto baktiawan, program penanganan gelandangan dan pengemis dikabupaten jember, jember 2017, jurnal.unmuhjember.ac.id, dikunjungi pada tanggal 21-0402018

http://id.wikipedia.org/wiki/daftar_kota_di_indonesia_menurut_jumlah_penduduk

<http://.wdy-z.blogspot.co.id/2013/09/gelandangan-pengemis-anak-jalanan-di.html>

hareraBrian

,“Gelandangan_dan_pengemis”

http://www.academia.edu/6492300/Gelandangan_dan_pengemis_makalah_gepeng

Admin, <http://jagokata.com/arti-kata/penanganan.html>, diunduh pada tanggal 15-10 -2017

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 Tentang penanganan Gelandangan dan Pengemis